



PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK SPBE PEMERINTAHAN KABUPATEN PALI (TAHAP ANALISA SPBE)

Oleh

Widya Cholil¹, Darius Antoni², Febriyanti Panjaitan³, Rolia Wahasusmia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Darma

E-mail: ¹widya@binadarma.ac.id, ²darius.antoni@binadarma.ac.id,

³Febriyanti_panjaitan@binadarma.ac.id, ⁴rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

Article History:

Received: 08-11-2021

Revised: 15-12-2021

Accepted: 07-01-2022

Keywords:

Rencana induk, SPBE,
Penukal Abab Lematang Ilir

Abstract: Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disusun sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan SPBE di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk lima tahun ke depan (2021-2026). Dalam penyusunannya dilakukan pemetaan kondisi awal yang menggambarkan SPBE atau e-Government pada yang telah diimplementasikan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan menghimpun berbagai keluhan serta harapan yang pada akhirnya mengarah pada kondisi ideal SPBE yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hingga lima tahun mendatang. Perencanaan tahapan-tahapan pengembangan dan penerapan SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dokumen rencana induk ini merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel, oleh karenanya dokumen ini harus senantiasa dikaji dan diselaraskan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi di masing-masing OPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jurnal ini merupakan proses kegiatan pelatihan penyusunan dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.



PENDAHULUAN

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah kabupaten salah satu kabupaten termuda di Sumatera Selatan setelah. Secara Astronomis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terletak pada 103036' - 104015'30" BT dan 3000' - 3025' LS. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada di Provinsi Sumatera selatan dan merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.840,00 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari 65 desa definitif dan 6 kelurahan. Dalam konteks regional, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilalui oleh jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan serta pusat kegiatan lokal.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di sebelah utara. Pada bagian selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berbatasan dengan kabupaten Muara Enim sedangkan di sebelah timur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih. Di sebelah barat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan data BPS pada dokumen Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka tahun 2021, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang bervariasi antara 48 mm sampai dengan 397 mm sepanjang tahun 2020. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan disektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, salah satu pengembangan wilayah di Kabupaten Penukal Abab Lematang diprioritaskan pada bidang pertanian modern yang dimana memiliki arti luas seperti perkebunan dan kehutanan.

Selain itu juga, pengembangan wilayah di Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir diprioritaskan pada bidang pertambangan dan infrastruktur. Potensi pertambangan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sangat kaya seperti batubara, minyak bumi dan gas. Keberadaan potensi pertambangan ini menjadikan wilayah kabupaten ini mampu mendanai pembangunan yang akan berlangsung. Diharapkan pengelolaan hasil tambang akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup signifikan apabila dilakukan pengolahan hilirisasi meskipun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat lokal sering terabaikan.

Di bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan fokus pada pelayanan dasar seperti kondisi jaringan jalan yang belum menjangkau semua kawasan kabupaten merupakan permasalahan kunci perkembangan pembangunan di wilayah ini. Selain itu kondisi transportasi lainnya seperti angkutan antar daerah yang menghubungkan dengan daerah lain masih dinilai sangat terbatas. Kawasan pusat pemerintahan yang saat ini baru pada tahap penyediaan lahan belum ada pembangunan kantor bupati maupun perangkat daerah lainnya sehingga membuat sulitnya akses informasi dan koordinasi yang terjadi terlebih beberapa kantor perangkat daerah masih menumpang dan menyewa.

Selain mengembangkan bidang pertanian, pertambangan dan infrastruktur, Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga dari waktu ke waktu terus berbenah diri dan bertekad untuk dapat mensejajarkan diri dengan wilayah lain. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam



penyelenggaraan pembangunan. Terkait hal tersebut kesiapan aparatur sipil negara sangat diperluka untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintahan daerah mampu melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, menyusun kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, serta pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan dari adanya SPBE sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2020 adalah agar dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintah yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terus berupaya mendorong setiap organisasi perangkat daerah (ODP) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara ODP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maa diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau *Master Plan* SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh ODP dalam membangun SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021-2026 dan tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menentukan arah pengembangan dan proses evaluasinya.

Diharapkan Rencana Induk SPBE ini dapat dijadikan acuan seluruh ODP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penerapan dan pemanfaatan SPBE. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka dokumen rencana induk ini harus bersifat dinamis (*living document*).

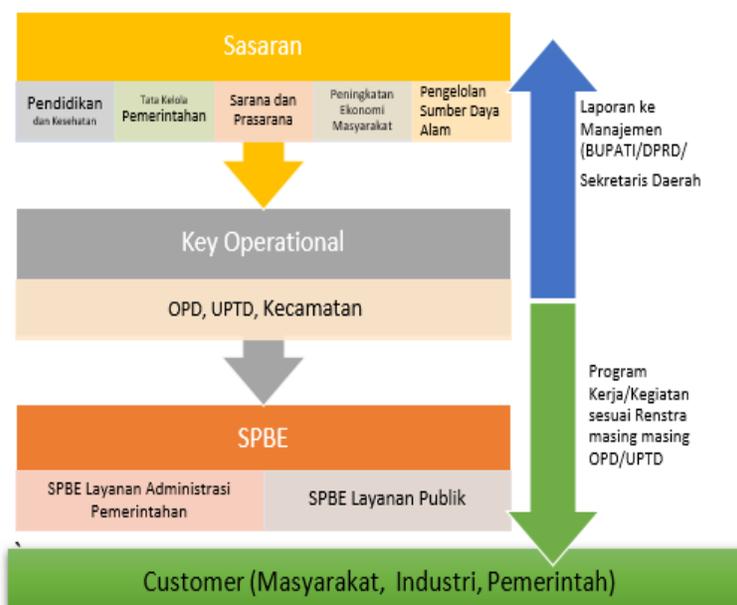


Terkait hal tersebut maka *review* dokumen yang dilakukan secara periodik diperlukan untuk menjaga aktualitas dokumen tersebut.

METODE

Pada prinsipnya metodologi penyusunan dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021-2026 ini mencakup beberapa langkah berikut:

1. Analisis terhadap kondisi saat ini (Surrent Condition)
Tahap analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi penerapan SPBE saat ini di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Termasuk di dalamnya kegiatan analisis aplikasi SPBE yang telah ada, infrastruktur jaringan, SDM pendukung, peraturan-peraturan (regulasi) internal yang berkaitan dengan penerapan SPBE.
2. Analisis terhadap kondisi ideal (Future State)
Langkah ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penerapan SPBE untuk mendukung tupoksi seluruh OPD-nya. Tahapan ini difokuskan pada bagaimana SPBE dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam hal ini juga dilakukan analisis terhadap kondisi internal, yaitu SDM pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan SPBE serta pengaruh- pengaruh external, khususnya perkembangan TIK.
3. Penyusunan Transition Plan
Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap kendala-kendala yang ada (*gap analysis*), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai agar SPBE dapat dipergunakan secara optimal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan kondisi yang ada saat ini. Dari tahapan ini dapat diketahui langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi ideal, berikut dengan penyusunan prioritasnya sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun lima tahun ke depan.





HASIL

Visi dan Misi SPBE

Berdasarkan pernyataan visi-misi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2022-2026 dan hasil kajian di atas maka berikut ini merupakan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

A. Visi SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Visi SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan cita-cita jangka panjang dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mencapai pengelolaan dan pelayanan pemerintahan secara efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, interoperabel dan aman melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan pembahasan mengenai visi dan misi serta berbagai masukan yang didapat, maka visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah:

“SPBE menuju terwujudnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sejahtera, mandiri dan bermartabat melalui pengelolaan dan pelayanan pemerintah berbasis elektronik”

B. Misi SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam mewujudkan visi SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka disusunlah misi SPBE sebagai penjabaran visi SPBE yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan media teknologi informasi.
- Meningkatkan kualitas sumber daya dan pembangunan manusia melalui penyediaan informasi dan pelayanan berbasis elektronik.
- Meningkatkan daya saing Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan akses informasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di semua sektor perekonomian.
- Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui pemanfaatan.

Tujuan dan Sasaran SPBE

SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dirancang untuk memberikan pelayanan pada lima kegiatan utama berdasarkan konsep elektronik government. Lima kegiatan utama tersebut menyangkut lima stakeholder yang berperan dalam rencana kemajuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:

- Pelayanan Pemerintah ke masyarakat umum (Government to Citizens),
- Pelayanan Pemerintah ke pelaku usaha berskala besar (Government to Business),
- Pelayanan Pemerintah ke Usaha ekonomi masyarakat (Government to Business Community),
- Pelayanan Pemerintah ke pemerintah (Government to Government), dan
- Pelayanan Pemerintah ke pegawainya (Government to Employee).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki tujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik, mandiri dengan meningkatkan kapasitas usaha dan perekonomian dan bermartabat dengan peningkatan koordinasi, akuntabilitas, transparansi dan keterpaduan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berikut adalah enam kegiatan utama untuk membentuk tujuan yang ingin dicapai dari implementasi SPBE di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir:



1. Government to Citizen (GtoC), yang memiliki arti tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta media untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan akses dan media informasi publik pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir untuk masyarakat.
- Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan masyarakat;
- Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan Pembangunan Manusia.
- Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat.
- Menyediakan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.

2. Government to Business (GtoB), adalah pemerintah mampu menyediakan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:

- Memperkuat sistem diseminasi informasi pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir untuk pelaku usaha.
- Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan bisnis.
- Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas dan pengelolaan pengkerjasama bisnis dan pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir .
- Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan untuk pelaku usaha.

3. Government to Business Community (GtoBC), adalah tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha ekonomi masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:

- Memperkuat sistem diseminasi informasi pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat.
- Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

4. Government to Government (GtoG), adalah dimana kondisi terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar OPD dan antar jenjang pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:

- Memperkuat layanan SPBE melalui integrasi dan koordinasi sistem pemerintahan yang berjenjang;



- Memperkuat layanan SPBE melalui penyediaan manajemen dan kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian data dan informasi.
 - Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing OPD yang dapat didistribusikan antar OPD sesuai kewenangannya.
5. Government to Employee (GtoE), dimana suatu pemerintah kabupaten mengimplementasikan sistem informasi yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam meningkatkan efisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:
- Menyediakan fasilitas otomasi perinstansian dalam kegiatan keseharian di lingkungan pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir .
 - Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi aparatur sipil negara baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuan maupun untuk peningkatan kesejahteraan secara online.
6. Integrasi Sistem, adalah terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi ke seluruh sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui integrasi data dan pembangunan pusat data (data center) Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Sehingga didapat sasaran sebagai berikut:
- Menyediakan standar sistem layanan data dan informasi yang disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi Generik (dipakai seluruh OPD), Suplemen (dipakai hanya beberapa OPD), dan Spesifik (dipakai hanya 1 OPD)
 - Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi dalam bentuk pusat data (data center) Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir yang terintegrasi.
 - Menyediakan sistem informasi eksekutif untuk membantu pengambil keputusan di Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Bupati Command Center).

Arsitektur SPBE

Jenis-Jenis Aplikasi SPBE

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan TIK di pemerintahan daerah. Masing-masing unit membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing.

Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terbagi menjadi dua yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dimana daerah harus terintegrasi ke dalamnya. Sedangkan aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten PALI.



Gambar 2. Aplikasi SPBE

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah dapat melakukannya setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Namun, demikian, sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Peta Rencana Aplikasi SPBE

Peta rencana aplikasi SPBE meliputi aplikasi yang dikembangkan pada layanan-layanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada rencana SPBE Kabupaten PALI.

- Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Layanan publik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.



- Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Peta rencana aplikasi SPBE adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan aturan aplikasi SPBE;
2. Pengkoordinasian aplikasi umum dengan jenjang pemerintahan lain;
3. Pengembangan aplikasi umum bersifat khusus untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten PALI;
4. Pengembangan aplikasi khusus pemerintah Kabupaten PALI;
5. Audit aplikasi SPBE Kabupaten PALI

Standarisasi Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam membangun Domain Arsitektur aplikasi SPBE diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi :

1. *Reliable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free.
2. *Interoperable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi system.
3. *Scalable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
4. *User Friendly*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.
5. *Integrateable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi SPBE baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Kondisi Jaringan dan Internet Saat ini

Tabel 1 Kondisi awal internet berdasarkan Renstra

No.	OPD	Koneksi jaringan Internet berdasarkan Renstra
1	Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Jaringan Internet tersedia 2 jalur, belum memiliki jalur telepon dan fax
2	Dinas Kesehatan Kabupaten PALI	Belum adanya internet yang terkoneksi pada dinas ini



3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menjelaskan tentang kegiatan komunikasi namun belum menjelaskan tentang kondisi jaringan yang terkoneksi internet
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlingan Anak Kabupaten PALI	Menjelaskan adanya rekening internet
5	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten PALI	Menjelaskan adanya rekening internet
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan seperti komputer yang terkoneksi internet belum maksimal
7	Dinas Perinakan PALI	Belum menjelaskan tentang kondisi koneksi internet pada Dinas ini
8	Dinas Komunikasi dan Informatika PALI	Menjelaskan tentang penerimaan sinyal telepon seluler di PALI pada tahun 2019-2020 menggunakan 4G/LTE Memberikan informasi tentang akses jaringan internet dan komunikasi masih terbatas di PALI, sering tidak ada sinyal bahkan jika listrik padam, maka sinyal telepon dan internet hilang.
9	Dinas Ketahanan Pangan	Belum menjelaskan tentang kondisi koneksi internet pada Dinas ini
10	Kecamatan Penukal	Menjelaskan adanya rekening internet
11	Kecamatan Tanah Abang	Belum menjelaskan tentang kondisi koneksi internet pada Dinas ini
12	Kecamatan Penukal Utara	Belum menjelaskan tentang kondisi koneksi internet pada Dinas ini

Dari 39 OPD hanya 12 OPD yang memberikan penjelasan terkait ada atau tidaknya



koneksi internet suatu dinas instansi. Dari 12 instansi tersebut ada 5 instansi atau dinas yang sudah memiliki koneksi internet. Tetapi sejauh ini belum ditemukan berapa besaran penggunaan dan kebutuhan bandwidth tiap dinas tersebut.

Laman OPD Saat ini

Berdasarkan informasi yang diambil mengenai Website / Laman OPD Kabupaten PALI yang sudah ada, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar *e-government* Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO	Nama Operasional Perangkat Daerah	Nama Domain Website
1	Kabupaten PALI	https://www.palikab.go.id/
2	Bappeda PALI	http://bappeda.palikab.go.id/
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PALI	https://jdih.palikab.go.id/web
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	http://bkpsdm.palikab.go.id/ SIPALI https://layanonline.bkpsdmpali.com/login.php Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penukal Abab Lematang Ilir
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbdd.palikab.go.id/web
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://disdukcapil.palikab.go.id/
7	Dinas Pendidikan	https://disdik.palikab.go.id/
8	Dinas Kesehatan	https://dinkespali.id/
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	https://diskominfo.palikab.go.id/
10	Sekretariat DPRD PALI	http://203.176.180.254/site/
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptsp.palikab.go.id/

KESIMPULAN

Secara umum, pengembangan Aplikasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mengarah pada sistem berbasis online. Hal ini sangat positif dan telah mendukung kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sangat menekankan konsep keterpaduan, baik data maupun proses. Aplikasi berbasis online dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.

Kondisi saat ini, pemerintah kabupaten PALI telah membangun berbagai infrastruktur, sistem informasi dan aplikasi guna mendukung terwujudnya SPBE. Sistem



Informasi yang dibangun oleh OPD teknis pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hingga Tahun 2019 terdapat 119 Aplikasi sistem informasi berdasarkan investaris data SPBE Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Aplikasi tersebut tersebar pada 20 OPD di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Beberapa aplikasi sudah mulai diterapkan seperti aplikasi layanan keuangan (SIMDA Keuangan), Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi perizinan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Gaji, Simda SPPD dan lainnya. (data terlampir)

OPD yang memiliki Aplikasi sistem informasi terbanyak yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sejumlah 15 sistem informasi. Di sisi lain terdapat 6 OPD yang hanya memiliki satu sistem informasi. OPD tersebut adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan inspektorat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yaitu aparat pihak pemerintahan Kabupaten PALI , masyarakat dan seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan Perencanaan SPBE PALI yang memberikan kesempatan kepada tim pengabdian untuk memberikan pendampingan sosialisasi. Terima kasih juga kepada DRPM Universitas Bina Darma.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- [2] Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 4 Seri C);
- [3] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- [4] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021-2026